

**PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI WILYAH
KPHP MODEL DAMPELAS TINOMBO DESA KARYA MUKTI
KECAMATAN DAMPELAS KABUPATEN DONGGALA**

**The Community Forest Plantation Development In The Forest Management Unit of
Dampelas Tinombo Model Area, Karya Mukti Village, Dampelas Sub District Of
Donggala**

Imran Rachman¹⁾

¹⁾Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako
Jl. Soekarno-Hatta, Km. 9 Palu, Sulawesi Tengah 94111

Email : imran_rachman@yahoo.com

Diterima: 25 November 2021, Revisi : 11 Maret 2022, Diterbitkan: April 2022

<https://doi.org/10.22487/agrolandnasional.v29i1.1096>

ABSTRACT

Determination of appropriate forest management was carried out to create sustainable forest conditions and optimally benefit community, both directly and indirectly. Law 41 of 1999 on forestry entrusted the establishment of forest management areas at the provincial, district/city levels, and management units in the form of the smallest forest management units (FMU) according to their main functions and designations. The implementation of forest management in FMUs was the embodiment of implementing forest management which include forest management activities. The government efforts to emphasize the law above were the issuance of Government Regulation (GR) 6 of 2007 in conjunction with GR 3 of 2008 concerning forest governance, formulation of forest management plans, as well as sustainable forest utilization. It explains that FMU included Conservation FMU, Protected FMU, and Production FMU. This research was conducted at the Production Forest of Karya Mukti Village, Dampelas Sub District of Donggala. Implementation time was from October to December 2017. The data sources obtained in this study consisted of secondary and primary data. The methods used to collect data was direct observation and interview using a questionnaire. It could be concluded that the biophysical condition of the location was very appropriate for the utilization of non-timber forest products such as rubber plantations because it could provide ecological benefits for environmental improvement and optimizing forest functions again. The development of Community Forest Plantation in the form of community empowerment in Karya Mukti Village was in accordance with the socio-economic conditions of the community because it could provide economic benefits to increase people's income.

Keywords : Community Plantation Forest in Conservation Forest Management unit area.

ABSTRAK

Penentuan pengelolaan hutan yang tepat dilakukan untuk mewujudkan kondisi hutan yang lestari dan bermanfaat secara optimum bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Undang-undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan mengamanatkan pembentukan wilayah pengelolaan hutan di tingkat propinsi, kabupaten/kota, dan unit pengelolaan yakni berupa unit-unit kesatuan pengelolaan hutan (KPH) terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya. Penyelenggaraan pengelolaan hutan dalam KPH menjadi perwujudan untuk melaksanakan manajemen hutan yang meliputi kegiatan tata hutan, upaya pemerintah dalam menegaskan UU tersebut di atas adalah di terbitkannya PP 6/2007 jo PP 3 Tahun 2008 tentang tata hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta pemanfaatan hutan yang menjelaskan KPH meliputi KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL), KPH Produksi (KPHP). Penelitian ini dilaksanakan di lokasi Hutan Produksi Desa Karya Mukti Kec.Dampelas Kabupaten Donggala. Waktu pelaksanaan mulai bulan oktober sampai dengan bulan Desember 2017. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder dan primer. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data metode observasi dan wawancara, yaitu dilakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti dan tanya jawab dengan menggunakan panduan pertanyaan dalam bentuk kuisisioner. Kondisi biofisik lokasi sangat tepat untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan tanaman dengan jenis tanaman karet karena dapat memberi manfaat ekologi untuk perbaikan lingkungan dan mengoptimalkan kembali fungsi hutan. Pengembangan HTR dalam bentuk pemberdayaan masyarakat di Desa Karya Mukti sangat sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat karena dapat memberi manfaat ekonomi untuk menambah pendapatan masyarakat.

Kata Kunci : Hutan Tanaman Rakyat di Wilayah KPHP.

PENDAHULUAN

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang di anugerahkan kepada Bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya dan wajib di syukuri. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus di urus dan di kelola, di lindungi dan di manfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun akan datang.

Sesuai dengan peraturan pemerintah no 6 tahun 2007 jo peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, kawasan hutan produksi dapat di manfaatkan dengan pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemungutan

hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Sedangkan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan diluar sektor kehutanan seperti pertambangan dan non pertambangan dilakukan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan.

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) merupakan salah satu alternatif skim pengelolaan hutan di hutan produksi dan diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi kawasan hutan negara terutama fungsinya untuk menjaga kelestarian hutan dan mensejahterakan masyarakat. HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian dalam sumber daya hutan.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Dampelas Tinombo mempunyai luas ± 112.292 ha meliputi: Hutan Lindung

(HL) seluas ± 21.211 ha, Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 10.026 ha, dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 81.055 ha, yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Donggala. Sebagian besar dari total luas hutan produksi tersebut merupakan hutan sekunder yang mempunyai potensi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu penyusunan pengembangan hutan produksi yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolanya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana menganalisis kawasan pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo Desa Karya Mukti Kecamatan Dampelas?

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengembangan hutan tanaman rakyat (HTR) di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo Desa Karya Mukti Kecamatan Dampelas.

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah dan instansi terkait dalam pengelolaan pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk pengembangan hutan tanaman rakyat di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo, Desa Karya Mukti, Kecamatan Dampelas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan yaitu dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2017. Lokasi penelitian terletak di kawasan hutan produksi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Dampelas Tinombo Desa Karya Mukti, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta KPHP Model Dampelas Tinombo, dan panduan pertanyaan dalam bentuk kuisioner.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera dan alat tuli menulis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan wawancara. Metode ini digunakan untuk mengamati kondisi aktual lapangan, baik kondisi biofisik hutan maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperlukan untuk menjawab tujuan penelitian, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperlukan sebagai penunjang dari data primer.

- a. Data primer terdiri dari data-data kondisi aktual dilapangan seperti jenis vegetasi dan penutupan lahan dikawasan hutan produksi, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti pemanfaatan kawasan (lahan) hutan di sekitar maupun di dalam kawasan hutan produksi untuk masyarakat, jenis pekerjaan atau mata pencaharian, tingkat pendapat responden, tingkat pendidikan responden dan luas lahan yang dimiliki responden.
- b. Data sekunder merupakan dan yang diperlukan sebagai penunjang data primer, yang terdiri dari keadaan umum lokasi penelitian, peta kawasan hutan KPHP Model Dampelas Tinombo, data curah hujan, topografi, jenis tanah, dan data pendukung lainnya yang diperoleh dari akses internet, kunjungan perpustakaan, maupun dari instansi terkait lainnya.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengambilan data dilakukan dengan cara pengambilan informasi melalui observasi (observasi langsung) di kawasan hutan produksi di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo Desa Karya Mukti serta wawancara kepada 5 ketua kelompok tani dari sekelompok tani yang masing-masing kelompok taninya berjumlah 25 orang dengan tujuan untuk menggambarkan pengembangan kawasan (lahan) hutan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan produksi.

Observasi

Dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, meliputi pengamatan terhadap kondisi aktual di lapangan yang terdiri dari pengamatan terhadap kondisi biofisik hutan produksi yang di rencanakan untuk hutan tanaman rakyat di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo Desa Karya Mukti Kecamatan Dampelas.

Metode observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis mengenai Analisis Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat Untuk di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo Desa Karya Mukti Kecamatan Dampelas.

Wawancara

Dalam melakukan wawancara, penentuan responden di pilih dengan menggunakan metode *Snowball Sampling* (teknik bola salju). *Snowball Sampling* merupakan salah satu metode penentuan responden yang dilakukan secara berantai (multi level) artinya peneliti mengumpulkan informasi dari salah satu responden yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti yaitu Kepala Desa Karya Mukti, selanjutnya dari responden tersebut peneliti akan menentukan responden berikutnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden terdahulu. Adapun responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah masyarakat/penduduk yang berdomisili atau menetap di Desa Karya Mukti Kecamatan Dampelas.

Dalam penelitian deskriptif tidak dipersoalkan jumlah responden, dalam hal ini penentuan jumlah responden sedikit atau banyak tergantung pada tepatnya pemilihan informan kunci dan kompleksitas serta keragaman fenomena sosial yang diteliti (Bungin, 2002).

Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satu uraian dasar sehingga dapat tema sebagaimana kecenderungan data.

Dari rumusan di atas dapat ditarik garis besar bahwa analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data yang telah terkumpul. Data yang terkumpul tersebut terdiri dari catatan lapangan, foto, dokumen terkait lainnya, artikel dan sebagainya.

Setelah data dari lapangan (kondisi biofisik kawasan hutan produksi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat) terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data diatas (observasi dan wawancara), maka data tersebut selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

Menurut Nazir (2003), bahwa tujuan analisis deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang di selidiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat di Wilayah KPHP Dampelas Tinombo di analisis menggunakan dua parameter pengamatan, yaitu potensi biofisik lokasi yang direncanakan untuk pengembangan Hutan Tanaman Rakyat serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan.

Hasil dan pengembangan Hutan Tanaman Rakyat diuraikan sebagai berikut.

Jenis Vegetasi

Jenis komoditi vegetasi yang di temukan di lokasi penelitian terdiri dari yang terbanyak adalah kelapa, kakao, durian, pisang dan yang terkecil mangga, gamal, dan kopi.

Kondisi vegetasi terutama pepohonan sangat jarang ditemukan di lokasi. Hal ini di sebabkan oleh berbagai aktivitas yang di

lakukan oleh masyarakat di dalam kawasan hutan seperti pembukaan lahan untuk ditanami non kehutanan (alpukat, coklat dan sebagainya) adalah untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti terlihat di gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1. Kondisi vegetasi di Wilayah yang direncanakan untuk pengembangan hutan tanaman rakyat yang masih kurang terurus.

Penutupan Lahan

Dari hasil survey lapangan dan analisis data liputan lahan/vegetasi di ketahui bahwa kawasan di wilayah DAS KPHP Model Dampelas Tinombo terdapat penggunaan lahan hutan dengan tutupan pertanian lahan kering serta penutupan lahan berupa sawah dan pemukiman. Kondisi ini menggambarkan bahwa kawasan hutan di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo telah lama dirambah /di kupasi sekelompok orang untuk penggunaan non-kehutanan seperti terlihat di gambar 2 di bawah ini :



Gambar 2. Kondisi penutupan lahan di Wilayah yang di rencanakan untuk

pengembangan hutan tanaman KPHP Model Dampelas Tinombo Desa Karya Mukti Kecamatan Dampelas.

Jenis Tanah, Topografi, Ketinggian, Curah Hujan dan Suhu

Berdasarkan hasil analisis peta lahan kritis Dampelas Tinombo, jenis tanah yang terdapat di wilayah KPHP di dominasi jenis podsolik merah kuning dan litosol. Jenis tanah lainnya adalah mediteran merah kuning dan litosol, aluvial, non calcic brown dan litosol. Jenis tanah di lokasi yang di rencanakan untuk pengembangan hutan tanaman rakyat di Desa karya mukti adalah podsolik merah kuning dan litosol.

Kondisi topografi pada kawasan hutan produksi di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo yaitu berada pada kelas lereng antara 25% - 30% atau kategori datar sampai agak curam sedangkan untuk ketinggian lokasi yang di rencanakan untuk pengembangan Hutan Tanaman Rakyat di Desa Karya Mukti adalah 500 m dpl.

Curah hujan Kabupaten Donggala tahun 2009-2013 di ketahui bahwa curah hujan rata-rata mencapai 1.600-2.600 mm/thn. Suhu udara maksimum / minimum berdasarkan data Tahun 2009-2013 berada pada 30,40°C dengan rata-rata 23,40°C.

Kondisi Sosial Ekonomi Responden Jenis Pekerjaan atau Mata Pencaharian

Berdasarkan hasil Observasi di lapangan dan wawancara terhadap responden di ketahui semua responden dengan jenis pekerjaan sebagai petani perkebunan. Selain itu pola nafkah yang terjadi di lokasi penelitian adalah pola nafkah ganda dalam artian responden selain pekerjaan utama sebagai petani juga melakukan pekerjaan lain seperti buruh tidak tetap dalam rangka menambah pendapatan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Tingkat Pendapatan Responden

Berdasarkan wawancara di lokasi penelitian terhadap responden dengan mata

pencaharian petani, pada umumnya mereka enggan memperhitungkan antara penghasilan yang diperoleh dengan biaya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

Berdasarkan analisis data yang telah di lakukan, tingkat pendapatan responden memiliki perbedaan dan kesamaan antara responden I dengan II responden yang lainnya. Tingkat pendapatan responden dapat di lihat pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1 Tingkat Pendapatan

Pendapatan	Responden	Persentase
1. < 500.000	1	5
2. 500.000-1.000.000	8	40
3. > 1.000.000-1.500.000	6	30
4. > 1.500.000	5	25
Total	20	100%

Dari susunan di atas menunjukkan bahwa pada umumnya tingkat pendapatan responden di dominasi oleh tingkat pendapatan Rp.500.000 sampai dengan Rp.1.000.000 perbulan dengan tingkat persentase 40%, di susul tingkat pendapatan Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.1.500.000 perbulan dengan persentase 30%, di ikuti tingkat pendapatan lebih dari Rp.1.500.000 dengan persentase 25% dan tingkat pendapatan kurang dari Rp.500.000 perbulan dengan persentase 5%.

Hasil di atas memperlihatkan bahwa jumlah pendapatan keluarga dapat berpengaruh terhadap kegiatan pembukaan lahan hutan. Hal ini di karenakan masyarakat Desa Karya Mukti hanya mengandalkan mata pencaharian dari sektor pertanian dan perkebunan. Sehingga dapat di katakan bahwa hal ini yang mempengaruhi atau mendorong masyarakat untuk membuka lahan di dalam kawasan hutan. Pengelolaan hutan yang di lakukan masyarakat tak luput dari keberadaan ekonomi masyarakat yang masih bergantung terhadap sumber daya hutan.

Tingkat Pendidikan Responden

Keadaan pendidikan masyarakat di sekitar wilayah KPHP Dampelas Tinombo umumnya di dominasi tingkat sekolah dasar bahkan tidak tamat sekolah dasar. Kondisi seperti ini juga di jumpai di lokasi penelitian yaitu Desa Karya Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah dan dari hasil analisis data yang telah di lakukan, keadaan tingkat pendidikan responden di Desa Karya Mukti dapat di lihat pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2 Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Responden	Persentase
1. Tamatan SD	11	55
2. Tamatan SMP	6	30
3. Tamatan SMA	3	15
Total	20	100%

Dari susunan di atas menunjukkan bahwa keadaan pendidikan responden di lokasi penelitian umumnya di dominasi oleh tingkat tamatan SD dengan persentase 55%, di susul tingkat tamatan SMP 30%, dan tamatan SMA 15%. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan di lokasi penelitian masih sangat rendah. Sesuai dengan wawancara dengan ketua kelompok tanaman karet bahwa tingkat pendidikan rata-rata anggota kelompok tani di dominasi oleh tingkat pendidikan tamatan SD. Kondisi pendidikan yang seperti ini tentunya akan berpengaruh langsung terhadap pembukaan lahan hutan oleh masyarakat, dimana masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah lebih cenderung untuk membuka lahan di dalam hutan seperti membuka lahan untuk ditanami kakao dan tanaman pertanian lainnya.

Hasil penelitian Tanaman (2009) dalam Juslianty (2012), menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal berhubungan nyata dengan partisipasi masyarakat dalam

mengadopsi inovasi yang datang pada mereka. Pendidikan yang tinggi memiliki cara berpikir dan kesadaran yang lebih akan pentingnya pembaharuan dalam kehidupan.

Luas Kepemilikan Lahan dan Pemanfaatan Lahan Oleh Responden.

Dari hasil wawancara dan pengumpulan data yang telah dilakukan di lokasi penelitian, diketahui bahwa responden yang bermukim di Desa Karya Mukti Kecamatan Dampelas mempunyai lahan garapan >2 Ha per KK (2,94 Ha/KK).

Sementara itu pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Karya Mukti pada umumnya adalah untuk usaha perkebunan kakao, cengkeh dan tanaman pangan lainnya.

Dengan melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo Desa Karya Mukti Kecamatan Dampelas dapat dikatakan bahwa beberapa kategori di atas mempunyai pengaruh terhadap tindakan masyarakat dalam mengokupasi lahan hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan.

Rencana Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat.

Lokasi pengembangan Hutan Tanaman Rakyat di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo Desa Karya Mukti, sesuai dengan peta penunjukan kawasan hutan Kabupaten Donggala dan peta wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo berada pada kawasan hutan produksi terbatas dengan luas areal 81.055 ha. Lokasi yang direncanakan untuk pengembangan hutan tanaman rakyat di Desa Karya Mukti adalah hutan produksi terbatas di wilayah Desa Karya Mukti yang telah dirambah oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini terjadi karena masyarakat Desa Karya Mukti memanfaatkan kondisi lingkungan yang subur dan baik untuk bercocok tanam tanpa memperhatikan dampak yang nantinya akan dihadapi oleh anak cucu pada masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap kondisi biofisik yaitu jenis vegetasi dan penutupan lahan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat dilihat dari beberapa aspek yaitu jenis pekerjaan atau mata pencaharian, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, luas kepemilikan lahan dan pemanfaatan lahan oleh responden atau masyarakat di Desa Karya Mukti, bahwa rencana pengembangan Hutan Tanaman Rakyat di lokasi yang sudah dirambah oleh masyarakat sangat tepat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dan mengupayakan untuk mengakomodir secara optimal, peran masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan dengan tujuan dapat mengoptimalkan kembali fungsi hutan dan dapat menunjang ekonomi masyarakat sehingga pengelolaan hutan lestari untuk mensejahterakan masyarakat dapat terwujud. Hal ini yang membuat KPHP Model Dampelas Tinombo merasa wajib untuk melakukan suatu kegiatan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengembangan Hutan Tanaman Rakyat di dalam hutan produksi yang telah dirambah dan dikupasi oleh masyarakat. Terhadap lahan-lahan hutan yang telah lama diolah dan digunakan oleh penduduk setempat dalam bercocok tanam usahatani seperti kakao serta tanaman semusim diupayakan dilakukan pembinaan secara intensif dengan tetap mengedepankan hak-hak mereka selaku pengguna lahan hutan. Pemberdayaan masyarakat di wilayah KPHP Dampelas Tinombo dapat dilakukan melalui pemberian bantuan dana pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan, serta pemberian areal hak pengelolaan lahan hutan secara khusus di wilayah KPHP. Selain itu, pemberian areal hak pengelolaan lahan dalam wilayah KPHP dimungkinkan karena sejak puluhan tahun silam telah melakukan usaha perkebunan masyarakat setempat.

Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi

hutan dan lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat ekonomi untuk menambah pendapatan masyarakat setempat.

Penyelenggaraan Hutan Tanaman Rakyat di Desa Karya Mukti dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerjabagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat.

Salah satu kegiatan yang sementara di lakukan dalam hal pemberdayaan masyarakat oleh KPHP Model Dampelas Tinombo pada hutan tanaman rakyat di Desa Karya Mukti adalah melalui kegiatan penanaman karet di kawasan hutan produksi.

Hutan tanaman merupakan hutan yang dibangun dan dikelola melalui permudaan buatan atau penaburan/penanaman bibit pohon dengan sengaja. Dalam kamus rimbawan Winarto. B (2006), dijelaskan bahwa hutan tanaman adalah hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat pada hutan tanaman rakyat di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo di Desa Karya Mukti agar masyarakat perambah hutan dapat teralihkannya perhatian untuk tidak memperluas areal atau wilayah perambahan. Faktor ini harus di dukung dengan sosialisasi dan kesadaran akan pentingnya keberadaan hutan bukan untuk saat ini saja tapi untuk generasi mendatang.

Langkah awal KPHP Model Dampelas Tinombo dalam hal pemberdayaan bagi masyarakat adalah dengan memberikan penyuluhan tentang pentingnya keberadaan hutan baik sekarang ataupun pada masa yang akan datang serta membentuk suatu Kelompok tanaman karet. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Karya Mukti yang masuk dalam Kelompok tanaman karet, mereka setuju dengan pengembangan Hutan Tanaman Rakyat di wilayah ini, dan mereka juga setuju pembentukan kelompok tanaman karet ini

yang di khususkan bagi masyarakat perambah serta mereka juga setuju dengan kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan tanaman.

Sesuai dengan wawancara terhadap masyarakat Desa Karya Mukti yang masuk dalam ketua kelompok tanaman karet, mereka setuju dengan kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan tanaman di areal perambahan mereka dengan melakukan *interplanting* tanaman kehutanan dengan tanaman perkebunan masyarakat, asalkan mereka tetap bisa melanjutkan usaha kebunnya. Masyarakat juga merasa diperhatikan pemerintah, terutama dalam pembentukan kelompok ini yang kemudian akan dibina oleh KPHP itu sendiri. Sesuai hasil wawancara terhadap ketua kelompok tanaman karet mereka setuju dengan pembinaan yang di lakukan oleh KPHP Model Dampelas Tinombo. Beberapa kegiatan dalam hal pembinaan yang dilakukan oleh KPHP Model Dampelas Tinombo diantaranya adalah memberi bimbingan teknis baik diminta ataupun tidak diminta, memberi bantuan tenaga pendamping terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan dan memberi bantuan benih / bibit tanaman serta memonitoring dan mengevaluasi kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok tanaman karet.

Dalam kegiatan pemanfaatan tanaman karet di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo Desa Karya Mukti, KPHP Model Dampelas Tinombo menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kegiatan ini, dimana untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh kelompok itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok itu sendiri seperti pembuatan persemaian yang dibuat dilokasi/areal penanaman dinilai dapat menimbulkan rasa memiliki dan tidak ada biaya pengangkutan dan mengurangi resiko stres pada tanaman yang dapat mengakibatkan kematian bibit.

Sesuai hasil wawancara di lokasi penelitian dengan kelompok-kelompok tanaman karet, dalam kegiatan melakukan *interplanting* tanaman kehutanan di antara tanaman perkebunan yaitu dengan pola

Agroforestry, mereka setuju dengan dengan jarak tanam 4 x 5 meter sehingga tetap memberi ruang untuk tanaman perkebunan masyarakat dengan tidak memperluas wilayah atau areal perambahan serta mereka juga setuju dengan persyaratan bagi hasil khusus untuk tanaman kehutanan dengan pihak KPHP Model Dampelas Tinombo dengan persyaratan bagi hasil 70% untuk masyarakat dan 30% untuk KPHP Model Dampelas Tinombo.

Pengusahaan tanaman karet ini merupakan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di pandang sebagai pemanfaatan biomassa hutan sebagai pabrik biomassa. Hasil hutan bukan kayu seperti getah dapat dimanfaatkan secara lestari tanpa menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem hutan yang berat (Departemen Kehutanan, 2007).

Berdasarkan wawancara terhadap masyarakat Desa Karya Mukti yang masuk dalam kelompok tanaman karet mereka setuju jika jenis tanaman yang ditanam di lokasi yang direncanakan untuk pengembangan hutan tanaman adalah jenis tanaman karet. Pemilihan jenis tanaman karet didasarkan atas kesepakatan bersama antara KPHP Model Dampelas Tinombo sebagai pihak pertama dan masyarakat Desa Karya Mukti yang masuk dalam kelompok sebagai pihak kedua. Pemilihan jenis tanaman karet yang akan ditanam di lokasi yang di rencanakan untuk pengembangan hutan tanaman rakyat di Desa Karya Mukti di nilai dapat bernilai ekologi, dan ekonomi.

Tanaman karet adalah tanaman tahunan dan merupakan kebutuhan yang vital bagi kehidupan manusia sehari-hari, hal ini terkait dengan mobilitas manusia dan barang yang memerlukan banyak komponen yang terbuat dari karet (Maria.N.I, 2013).

Karet adalah polimerhidrokarbon yang terkandung pada lateks. Lateks diperoleh dengan melukai kulit batangnya sehingga keluar cairan kental yang kemudian ditampung. Cairan ini keluar akibat tekanan turgor dalam sel yang terbebaskan akibat pelukaan. Aliran berhenti apabila semua isi

sel telah habis dan luka tertutup oleh lateks yang membeku.

Untuk dapat tumbuh dengan optimal dan menghasilkan produktivitas lateks yang baik, tanaman karet memiliki persyaratan tumbuh yang baik. persyaratan tumbuh karet yang baik sangat dipengaruhi oleh faktor iklim dan tempat tumbuh. Iklim dan tempat tumbuh yang baik untuk tanaman karet agar dapat tumbuh optimal hingga menghasilkan lateks adalah sebagai berikut:

a. Iklim

Tanaman karet tumbuh optimal pada daerah beriklim tropis dengan curah hujan antara 2.000 mm hingga 2.500 mm per tahun. Suhu optimal yang diperlukan tanaman berkisar antara 25°C hingga 30°C. Suhu harian lebih dari 30°C akan mengakibatkan tanaman karet tidak akan dapat tumbuh dengan baik.

b. Tempat tumbuh

Tanaman karet dapat tumbuh diberbagai jenis tanah, kendatipun hanya dapat tumbuh optimal pada lahan dengan tanah dari jenis vulkanis dan alluvial. Pada dasarnya tanaman karet tumbuh optimal pada daerah dataran rendah dengan ketinggian 200 meter di atas permukaan laut sampai dengan 400 meter di atas permukaan laut (Damanik S, dkk, 2010).

Berdasarkan hasil yang di dapat dari Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo di pengaruhi oleh dua musim yang tetap yakni musim Barat dan musim Timur dengan iklim tropis. Dari hasil analisis Peta Curah Hujan RTKRHL BPDAS Palu Poso Tahun 2009, curah hujan rata-rata tahunan di wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo berkisar 1.600 – 2.600 mm/tahun. Dibandingkan dengan syarat tumbuh yang baik untuk tanaman karet, hasil ini dapat dikatakan sesuai dengan syarat tumbuh karet yang baik terutama untuk mendukung produktivitasnya dalam menghasilkan lateks.

Suhu optimal yang baik untuk pertumbuhan karet sesuai dengan syarat tumbuh karet yang baik adalah 23°C hingga

40°C. Berdasarkan data yang didapat dari hasil pencatatan suhu udara pada Stasiun Pengamat Cuaca di Desa Olaya Kecamatan Parigi tahun 2002 sampai dengan Tahun 2006 diketahui bahwa rata-rata suhu udara maksimum adalah 30.40°C sedangkan rata-rata suhu udara minimum adalah 23.40°C. Kelembaban udara rata-rata adalah 87,53%, tertinggi terjadi pada bulan Oktober yang mencapai 98%, sedangkan kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Juli yaitu 67%. (Maria, N I 2013). Berdasarkan hasil yang didapat, dibandingkan dengan syarat tumbuh karet yang baik, dapat dikatakan bahwa suhu di lokasi yang di rencanakan untuk pengembangan Hutan Tanaman di Desa Karya Mukti sesuai dengan syarat tumbuh karet yang baik terutama dalam mendukung produktivitasnya untuk menghasilkan lateks.

Berdasarkan pengembangan Hutan Tanaman Rakyat dengan jenis kegiatan pemanfaatan tanaman karet di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo dengan hasil penelitian yaitu kondisi biofisik (jenis vegetasi dan penutupan lahan) lokasi yang di rencanakan untuk pengembangan hutan tanaman rakyat dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Karya Mukti didapat hasil bahwa rencana pengembangan hutan tanaman rakyat di Wilayah KPHP Model Dampelas Tinombo adalah sesuai dengan kondisi biofisik lokasi yang direncanakan untuk pengembangan hutan tanaman rakyat dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Karya Mukti. Sesuai dengan PP No 6 Tahun 2007 bahwa hal ini merupakan bentuk pemanfaatan kawasan yaitu dengan memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pengembangan hutan tanaman rakyat dengan jenis tanaman karet sangat sesuai

- dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat karena dapat memberi manfaat ekonomi untuk menambah pendapatan masyarakat.
2. Kondisi biofisik lokasi sangat tepat untuk pengembangan hutan tanaman rakyat dengan jenis tanaman karet karena dapat memberi manfaat ekologi untuk perbaikan lingkungan dan mengoptimalkan kembali fungsi hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Planologi Kehutanan, 2006. *Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan Tentang Pembangunan Kehutanan Pengelolaan Hutan (KPH) Model*. Jakarta.
- Bungin, 2002. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Fajar Interpramata Offset. Jakarta.
- Damanik dkk, 2010. *Budidaya dan Pasca Panen Karet*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan. Bogor.
- Direktorat Jendral Planologi Kehutana, 2010. *Rencana Strategis 2010-2014*. Direktorat jendral Planologi Kehutanan. Jakarta.
- Herawati, Tuti, 2011. *Hutan Tanaman Rakyat : Analisis Proses Perumusan Kebijakan dan Rancangan Bangun Model Konseptual Kebijakan*. http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/46835/201_1_the_bab%202011.%20Tinjauan%20Pustaka.pdf?sequence=7. Diakses tanggal 17 Maret 2012.
- Juslianty., 2012. Skripsi: *Analisis Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Wilayah KPH Model Dampelas Tinombo Desa Kambayang Kecamatan Dampelas*. Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako.Palu

- Maria N.I, 2013. Karya Tulis: *Teknik Pembuatan Bahan Tanam Karet Unggul Dalam Rangka Revitalisasi Karet Indonesia*. Surabaya.
- Nazir, M.,2003. *Metode Penelitian*. PT.Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1970, *Tentang Perencanaan Hutan*. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999, *Tentang Pengusahaan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004, *Tentang Perencanaan Kehutanan*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007, *Tentang Tata Hutan dan Rencana Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 tahun 2010, *Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)*. Jakarta.
- Samsuri, 2003. *Panduan Praktek Umum Kehutanan 2003. Program Ilmu Kehutanan USU*. Medan.
- Undang-Undang republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, *Tentang Kehutanan*. Jakarta.
- Winarto, B., 2006. *Kamus Rimbawan*. Yayasan Bumi Indonesia Hujau. Jakarta.
- Zaitunah, A., 2004. *Perencanaan Pengelolaan Hutan dalam Panduan Praktek Umum kehutanan (PUK)*. Jurusan kehutanan Fakultas Pertanian USU. Medan.